



**PEMBERDAYAAN WILAYAH PERBATASAN RI – RDTL MELALUI  
PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN STABILITAS KEAMANAN WILAYAH**

**EMPOWERMENT OF THE BORDER REGION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA -  
THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR LESTE THROUGH THE DEVELOPMENT  
OF STATE BORDER POSTAGE IN ORDER TO IMPROVE THE STABILITY  
OF THE SECURITY AREA**

Ildefonso Aklis Do Carmo<sup>1</sup>, Suryono Thamrin<sup>2</sup>, Surryanto D.W<sup>3</sup>

Program Studi Strategi Pertahanan Darat  
Universitas Pertahanan  
( Ildefonsoadc57@gmail.com )

**Abstrak** - Ancaman pertahanan negara di Perbatasan RI-RDTL yang semakin menguat disebabkan oleh belum tuntasnya kesepakatan mengenai perbatasan antar Negara, Tingginya angka kemiskinan dan keluarga prasejahtera, kondisi wilayah, penyebaran penduduk yang tidak merata dan SDM yang rendah. Oleh karena itu pembangunan wilayah perbatasan di NTT antara Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste sangat penting dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan untuk menentukan pemberdayaan wilayah perbatasan RI-RDTL melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan RI-RDTL. Melalui pemberdayaan wilayah yang dilakukan oleh Pos Lintas Batas diharapkan dapat turut membantu pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan RI-RDTL. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah ancaman pertahanan negara di Perbatasan RI-RDTL, kinerja Pos Lintas Batas Negara dalam mengatasi ancaman pertahanan negara di Perbatasan; dan strategi Pemberdayaan Wilayah Perbatasan RI-RDTL guna mengatasi ancaman pertahanan negara di Perbatasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Ancaman pertahanan negara di perbatasan berkaitan dengan ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam; Kinerja Pos Lintas Batas Negara cukup baik dalam mengatasi ancaman pertahanan negara di perbatasan dengan melakukan pendataan, pendalaman, penggalangan, koordinasi dan komunikasi sosial; dan Strategi Pemberdayaan Wilayah Perbatasan RI-RDTL guna mengatasi ancaman pertahanan negara di perbatasan dilakukan melalui peningkatan kemampuan prajurit, kuantitas prajurit, responsivitas informasi dan situasi serta pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan prioritas. Untuk meningkatkan kinerja Pos Lintas Batas Negara perlu penguatan berdasarkan skala prioritas.

Kata Kunci: Ancaman, Strategi dan Kinerja

---

<sup>1</sup> Magister Program Studi Strategi Pertahanan Darat Cohort 6, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Fakultas Strategi Pertahanan Darat, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Fakultas Strategi Pertahanan Darat, Universitas Pertahanan

**Abstract** - The threat of national defense in the RI-RDTL Border that is getting stronger is caused by the incomplete agreement on inter-state borders, high poverty rates and underprivileged families, regional conditions, uneven distribution of population and low human resources. Therefore the development of the border region in NTT between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of East Timor is very important. This research was conducted to determine the empowerment of the RI-RDTL border region through the construction of the Trans-National Border Post in order to improve security stability in the RI-RDTL border region. Through regional empowerment carried out by the Trans-Border Post, it is hoped that it can help in the implementation of development in the RI-RDTL border region. The problems examined in this study are the threat of national defense at the RI-RDTL Border; the performance of the State Cross-border Post in addressing the threat of national defense at the Border; and the RI-RDTL Border Area Empowerment strategy to overcome the threat of national defense at the Border. The research method used is qualitative. The results showed that; The threat of national defense at the Border relates to ideological, political, economic, socio-cultural and security threats; The performance of the Trans-National Border Post is quite good in overcoming the threat of national defense at the Border by conducting data collection, deepening, raising, coordinating and social communication; and the RI-RDTL Border Area Empowerment Strategy to overcome the threat of national defense at the Border is done through enhancing the capability of soldiers, the quantity of soldiers, the responsiveness of information and the situation and the procurement of facilities and infrastructure based on priorities. To improve the performance of the State Cross Border Post, it is necessary to strengthen based on priority scale

Keywords: Threats, Strategy and Performan



## Pendahuluan

Perbatasan negara merupakan batas fisik sebuah negara yang mengekspresikan kedaulatan negara dan hak berdaulat dalam wujud kekuasaan nasional pada umumnya, kekuasaan hukum yang lebih dikenal dengan yurisdiksi nasional pada khususnya. Sehingga melalui perbatasan, negara dan atau penduduk diseperti wilayah tersebut dapat berinteraksi baik langsung maupun tidak langsung. Wujud interaksi dapat berupa pengaruh positif dan negatif bergantung kepada kemampuan interaksi negara atau penduduk yang bersangkutan.

Oleh karena itu perbatasan negara memiliki dua fungsi yaitu sebagai pengikat kedalam (*boundaries*) dan sebagai kesatuan wilayah negara/kawasan (*frontier*)<sup>4</sup>. Pengelolaan wilayah perbatasan negara sebagaimana dimaksud menjadi sangat strategis karena pengelolaan wilayah negara tersebut harus mampu menjamin keseimbangan gaya sentripetal (orientasi penduduk *frontier* mengarah kepada pusat kekuasaan negara induk) dengan gaya *sentrifugal* (orientasi penduduk *frontier* mengarah pada kekuasaan negara tetangga). Bila gaya *sentrifugal* lebih besar dari *sentripetal*, tidak mustahil terjadi

disorientasi wawasan kebangsaan penduduk *frontier* mengarah kepada negara tetangga.

Oleh sebab itu pengelolaan perbatasan pada konteks *frontier*/wawasan perbatasan lebih rumit karena ditujukan kepada penduduk *frontier* dengan segala aspek kehidupannya. Sedangkan pengelolaan *boundaries*/batas-batas yang harus dilaksanakan tidak bisa dianggap sederhana karena menyangkut hajat hidup warga Negara yang harus diperlakukan sama dengan warga Negara yang lain, dalam hal ini wujud pos perbatasan perlu menghadirkan kekuatan patroli/pengawasan/pengamanan perbatasan guna menjamin stabilitas keamanan negara.

Dengan latar belakang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta km atau 70% dari luas wilayah NKRI<sup>5</sup>. Dengan demikian, Indonesia mempunyai wilayah perbatasan negara yang luas serta mempunyai peranan dan nilai strategis dalam mendukung tegaknya kedaulatan negara, sehingga pemerintah dalam hal ini menjalankan tugas negara dan segenap komponen masyarakat Indonesia

---

<sup>4</sup> Henk Van Houtum, "The Geopolitics of Borders and Boundaries", Jurnal Geopolitics, Vol.10, No. 4, 2005, hlm.673

---

<sup>5</sup> HughWolverine, "Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Terbesar Di Dunia #IniIndonesiaku", dalam <https://www.kaskus.co.id/thread/5b7c5a2496bde6102b8b4567/indonesia-sebagai-negara-kepulauan-terbesar-di-dunia-iniindonesiaku/>, 12 Juli 2017, diakses pada 10 Agustus 2019

wajib memperhatikan kesejahteraan dan keamanan nasional di wilayah perbatasan.

Sebagaimana kita ketahui, wilayah daratan Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara yang diantaranya Malaysia di pulau Kalimantan, Papua Nugini di pulau Papua dan Republik Demokratik Timor Leste di pulau Timor dengan karakteristik berbeda-beda dilihat dari segi kondisi geografis, demografis, sosial, politik ekonomi dan budaya. Terlepas dari itu semua, dimana sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia khususnya perbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi serta keamanan yang masih sangat terbatas.

Mendasari hal tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengeluarkan perbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah perbatasan antara lain Undang-Undang no. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara RI, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Keseluruhan instrumen pengatur di atas, merupakan landasan hukum dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara sebagai bagian integral pengelolaan wilayah negara. Menyangkut hal tersebut, beberapa fenomena/permasalahan yang dihadapi wilayah perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste antara lain:

*Pertama*, belum tuntasnya kesepakatan mengenai perbatasan antar negara, ditandai adanya beberapa wilayah yang masih menjadi sengketa di perbatasan RI-RDTL : 1) Unresolved Segment meliputi daerah Noel Besi di Wilayah Kab. Kupang dengan luas 1069 Ha, daerah Bijael Sunan Oben di Wil Kab. TTU dengan luas 142,7 Ha, daerah Memo di Wilayah Kab. Belu berupa delta sungai dengan luas 41,9 Ha. 2) Unsurveyed Segment di wilayah Subina dengan luas 683 Ha/sengketa adat dengan jumlah penduduk 333 KK. Pada pertemuan antara pemerintah RI dan Timor Leste di TSC-BDR ke 21 di Bandung pada tanggal 03 s.d 04 Juli 2008 dan pertemuan TSC-BDR ke 22 di Dili pada tanggal 27 s.d 29 Mei 2009 diadakan penetapan GBN dan lahan tersebut menjadi bagian wilayah RDTL.

Namun masyarakat RI yang tinggal di daerah Subina sampai dengan Oben masih memperlakukan lahan tersebut atau secara umum belum bisa menerimanya. Sehingga perlu diadakan survey, namun sampai saat ini belum bisa dilaksanakan

karena pelaksanaan survey sebelumnya pernah ditolak masyarakat RI di wilayah tersebut.

Adapun daerah bermasalah tersebut semuanya berada di wilayah Kab. TTU meliputi daerah Subina yang merupakan tanah masyarakat di desa Inbate dengan luas tanah 206 Ha, daerah Pistana merupakan tanah masyarakat desa Sungkaen dan desa Naibaban dengan luas tanah 142 Ha, daerah Haumeniana-Nefonunpo merupakan tanah masyarakat di desa Haumeniana dengan luas tanah 107 Ha, daerah Tubu-Ninulat merupakan tanah masyarakat desa Tubu dan desa Ninulat dengan luas tanah 130 Ha.

Keseluruhan wilayah yang menjadi sengketa ini masih mempunyai potensi konflik yang cukup besar yang bisa mengganggu stabilitas keamanan perbatasan Republik Indonesia - Republik Demokratik Timor Leste.

*Kedua*, Tingginya angka kemiskinan dan keluarga prasejahtera. Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan yang dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur baik pendidikan, kesehatan, transportasi, maupun telekomunikasi, rendahnya produktivitas masyarakat dan

belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam.

Implikasi lebih lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di wilayah perbatasan mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan melanggar hukum guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selain melanggar hukum dan potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban juga sangat merugikan negara.

*Ketiga*, luas dan jauhnya wilayah perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste dari pusat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten; keterbatasan aksesibilitas yang mengakibatkan sulitnya dilakukan pengawasan dan pengamanan;

*Keempat*, penyebaran penduduk yang tidak merata dengan kualitas SDM yang rendah. Kondisi ini diperparah dengan timbulnya kesenjangan ekonomi antarwilayah sehingga mendorong terjadinya kegiatan ilegal di wilayah perbatasan seperti perdagangan ilegal (*illegal trading*), lintas batas ilegal, perdagangan manusia (*human trafficking*), dan kejahatan transnasional (*transnational crimes*) sehingga menjadi kasus-kasus keamanan yang sering terjadi di wilayah perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste. Kasus-kasus tersebut tidak terlepas dari keunikan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, dimana warga negara Indonesia

yang tinggal di perbatasan khususnya di wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka memiliki ikatan persaudaraan dengan warga negara Republik Demokratik Timor Leste. Keunikan tersebut merupakan kearifan lokal dan telah diwadahi dalam kesepakatan kedua negara khususnya tentang lintas batas, namun keunikan tersebut telah disalah artikan sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran.<sup>6</sup>

Mencermati fenomena terkait kondisi perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste di wilayah NTT saat ini dan agar tidak menjadi suatu ancaman nyata yang serius dimasa mendatang, maka diperlukan upaya peningkatan pemberdayaan melalui kebijakan dan strategi yang tepat untuk meningkatkan ketahanan wilayah yang tangguh dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste.

Hal ini dikarenakan pembangunan wilayah perbatasan di NTT antara Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste sangat penting dilakukan sebagaimana yang telah tertuang didalam Rencana Pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat perbatasan dan meningkatkan ketahanan disegala bidang.

---

<sup>6</sup> Slamet, “Perbatasan RI-RDTL Arti Penting dan Sumber Ancaman”, dalam <http://linggaakmil98.blogspot.com/2011/03/v-behaviorurldefaultvml-o.html> , 03 Agustus 2018, diakses pada 25 Juli 2019

Kondisi pembangunan wilayah perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste di NTT saat ini masih jauh tertinggal dari pembangunan di daerah lain. Keterbelakangan pembangunan di daerah perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste yang dilaksanakan pemerintah karena belum adanya keseriusan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan wilayah perbatasan, sehingga sangat berpengaruh terhadap lambannya pembangunan di kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh pemerintah RI.

Kondisi tersebut sebagaimana terlihat dimana pembangunan masih belum tertata dan merata kususnya pembangunan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih sangat minim walaupun di beberapa Kabupaten seperti halnya Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka telah dilaksanakan pembangunan mega proyek berupa pembangunan Pos Lintas Batas Negara Negara, embung pelabuhan, perpanjangan landasan pacu bandara dan jalan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya pemberdayaan wilayah perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan wilayah, dengan

harapan dapat memberikan sumbang pikiran kepada pemerintah dalam upaya Peningkatan Stabilitas kemananan wilayah perbatasan Republik Indonesia - .Republik Demokratik Timor Leste.

### **Kerangka Teoritik**

Wilayah di Perbatasan Negara Indonesia dengan negara Republik Demokratik Timor Leste masih merupakan daerah tertinggal. Kondisi masyarakat disana berpendidikan rendah dan banyak yang merupakan warga miskin. Sementara itu ketersediaan sarana dan prasarana umum masih sangat terbatas sehingga kesejahteraan dan kehidupan masyarakat pada beberapa wilayah tergolong tertinggal dibanding wilayah lainnya. Dari sisi keamanan, sebagai daerah perlintasan wilayah tersebut rawan kegiatan penyelundupan barang terlarang dan penyelundupan manusia. Ditambah dengan belum adanya ketetapan batas wilayah maka ancaman terhadap pertahanan dan ketahanan semakin rawan. Wilayah perbatasan RI dengan Timor Leste seolah tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan.

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai

dampak dari adanya pembangunan.<sup>7</sup> Dengan lambatnya proses perubahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah perbatasan RI – RDTL maka lambat pula perkembangan wilayah maupun masyarakat di daerah perbatasan tersebut.

Agar terjadi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, maka pembangunan wilayah perbatasan RI – RDTL harus diintensifkan dan menjadi prioritas pemerintah. Segala sumberdaya sebagai kuatan pembangunan khususnya yang berada di daerah perlu diberdayakan.

Di wilayah perbatasan terdapat satuan pengamanan yang menempati Pos Lintas Batas Negara. Keberadaan Poslintas batas Negara sudah seharusnya turut berperan dalam membantu memperbaiki kondisi yang ada demi kepentingan pertahanan Negara.

Pos Lintas batas Negara dapat melakukan Pemberdayaan Wilayah Perbatasan untuk membantu masyarakat sekitar. Dengan keterlibatan Pos Lintas batas Negara dalam Pemberdayaan Wilayah Perbatasan diharapkan dapat membantu Peningkatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam menciptakan stabilitas wilayah perbatasan.

---

<sup>7</sup> Riyadi & Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.17

## Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumberdata berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Instansi setempat diantaranya Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI – RDTL, Pemerintah Daerah dan pihak kepolirian (Polres) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur.

Data dianalisis dengan tahapan analisa data menurut teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming).<sup>8</sup>

## Pembahasan

### Pemberdayaan Wilayah Perbatasan RI - RDTL Oleh Pos Lintas Batas Negara.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin

untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.

Program Pemberdayaan Wilayah merupakan bentuk pengembangan dari model perencanaan pembangunan yang berpihak pada pembangunan manusia khususnya masyarakat di Wilayah Perbatasan RI-RDTL

Keberhasilan dan indikator pemberdayaan masyarakat dapat diukur berdasarkan indikator-indikator dan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup>

### Minat dan kebutuhan

Minat dan kebutuhan harus berdasarkan minat dan kebutuhan yang dirasakan (felt – need) artinya program yang akan dirumuskan harus bertolak dari minat dan kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat sehingga program itu benar-

---

<sup>88</sup> Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J., *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, (Edition 3). USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm.112

---

<sup>9</sup> Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Public*, (Surakarta: Alfabeta, 2014) Hal. 99

benar dirasakan sebagai pemecahan masalah atau pencapaian tujuan yang dikehendaki.

Kebutuhan infrastruktur sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat, walaupun belum semua kebutuhan masyarakat terpenuhi. Salah satu kegiatan mendukung peningkatan ekonomi dan menjadi akses langsung terhadap pemanfaat potensi pertanian, perkebunan, perikanan, sumber air bak dan potensi lain dalam memanfaatkan potensi sumberdaya berdasarkan minat dan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Minat dan kebutuhan masyarakat sudah dilakukan berdasarkan prioritas pemilihan usulan kegiatan minat dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilaksanakan pada kegiatan Musyawarah Desa sebagai bagian dari tahapan perencanaan partisipatif masyarakat dalam penentuan minat dan jenis kebutuhan infrastruktur yang akan dibangun.

Penerima Manfaat Program yang digulirkan diwilayah perbatasan menjadi pertimbangan untuk menentukan prioritas usulan masyarakat yang direalisasikan, karena secara otomatis berakibat pada manfaat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

1. Adanya Ketersediaan Lahan merupakan peluang Pemerintah dalam menerapkan program pemberdayaan masyarakat yang

dapat lebih nyata memberikan perubahan pada kehidupan masyarakat, missal dengan sebahagian besar lahan adalah kawasan daratan seharusnya program pertanian kehutanan, tanaman pangan dan lainnya menjadi perhatian Pemerintah supaya kesan yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Wilayah perbatasan dapat terjaga sehingga akan dapat memberikan jaminan keamanan dan pertahanan Indonesia, karena masyarakat pun tentu bertanggungjawab.

2. Prioritas pelaksanaan program belum seluruhnya menyentuh katung-katung kemiskinan, hal ini dibuktikan adanya kesenjangan antara penduduk satu dengan yang lainnya, salah satu yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan adalah belum meratanya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam yang dimiliki.
3. Metode pengerjaan masih menggunakan alat/teknologi Teknologi yang sederhana sedangkan dibutuhkan pengerjaan kegiatan dengan menggunakan peralatan berat
4. Waktu Pelaksanaan kurang sesuai dengan target yang telah disepakati

sebelumnya, karena sulitnya untuk mendapatkan bahan baku.

Dengan demikian minat dan kebutuhan masyarakat sudah mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan baik, minat dan kebutuhan tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan selaras dengan rencana kerja program yang diimplementasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur.

### **Pengorganisasian masyarakat**

Pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuannya, mengembangkan kepercayaan diri dan kemauan untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan, menemukan sumber daya (internal/eksternal) untuk menangani kebutuhan-kebutuhan, mengambil tindakan dan mengembangkan sikap kooperatif dan kolaboratif dan praktik di masyarakat.<sup>10</sup>

Tujuan utama pengorganisasian masyarakat bawah adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.

Pengorganisasian masyarakat sudah menjadi prioritas setiap tahapan kegiatan

Program Pemberdayaan Wilayah Perbatasan oleh Pos Lintas Batas Negara melalui proses kegiatan Musyawarah Desa I yang memilih dan menetapkan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan Kader Desa (KD) sebagai organisasi masyarakat yang berperan dalam dan pelaksanaan pembangunan.

Pengorganisasian masyarakat sangat penting di dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat karena organisasi masyarakat merupakan instrumen institusional dimana kinerja pembangunan dapat diukur dan berdasarkan tujuan awal program pemberdayaan, maka program atau usaha ini dapat dikatakan telah efektif dikarenakan telah mencapai salah satu tujuannya yakni keterlibatan masyarakat bawah dimulai dari keluarga, kekerabatan dan persaudaraan sehingga keefektifan pemberdayaan dapat dilaksanakan.

Dengan demikian dalam hal pengorganisasian masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Wilayah Perbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

### **Keragaman Budaya Lokal.**

Pentingnya budaya lokal dalam proses pembangunan masyarakat karena unsur-unsur budaya lokal mempunyai

---

<sup>10</sup> Aprilia Theresia dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.237

legitimasi tradisional di mata masyarakat binaan yang menjadi sasaran program pemberdayaan dan pembangunan, secara simbolis merupakan untuk komunikasi paling berharga dari penduduk setempat, mempunyai aneka ragam fungsi (baik terwujud maupun terpendam) yang sering menjadikannya sebagai sarana yang paling berguna untuk perubahan dibandingkan dengan yang tampak pada permukaan.<sup>11</sup>

Potensi sosial budaya lokal kurang memberikan pengaruh yang baik pada lingkungan wilayah perbatasan, misal Karang Taruna selaku Organisasi Kurang berperan aktif dalam mengakomodir dan memberikan inovasi kepada Pemuda/pemudinya supaya lebih hidup produktif hal ini dilatarbelakangi oleh Kemampuan SDM yang terbatas sangat menghambat pada program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memberikan jaminan perbaikan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan.

Kegiatan pelatihan di Lembaga pendidikan & keagamaan belum dapat dilaksanakan secara rutin, padahal dengan melakukan pemberian materi yang berulang-ulang akan dapat membantu SDM masyarakat wilayah perbatasan agar dapat melakukan inovasi-inovasi dengan melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah lokal dimaksud.

### **Perubahan Budaya**

Nilai-nilai budaya yang berada di dalam masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pemberdayaan masyarakat. Kearifan lokal atau nilai-nilai budaya selalu dijadikan pedoman atau acuan oleh masyarakat dalam bertindak atau berperilaku dalam praktek kehidupannya sehingga mempunyai dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat karena nilai-nilai budaya tersebut memberikan input bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat atau dapat diartikan pemberdayaan masyarakat sudah menyesuaikan dengan perubahan budaya setempat. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat berdasarkan perubahan budaya sudah memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

### **Kerjasama dan partisipasi**

Tumbuh berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan hal-hal seperti : adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat dan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.<sup>12</sup>

Dilihat dari jumlah kehadiran masyarakat masing-masing desa dalam setiap kegiatan musyawarah desa cukup rendah dan apabila dibandingkan dengan jumlah total Kepala Keluarga (KK) di satu

---

<sup>11</sup> Ibud. hlm.59

---

<sup>12</sup> Ibid. hlm. 207

desa maka rata-rata presentase kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosialisasi desa sebesar 4,74 persen, rata-rata tingkat partisipasi kegiatan Musyawarah Desa I sebesar 6,67 persen, rata-rata tingkat partisipasi kegiatan Musyawarah Desa II sebesar 11,55 persen dan rata-rata tingkat partisipasi kegiatan Musyawarah Desa III sebesar 10,35 persen. Dengan demikian prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis kerja sama dan partisipasi belum dilaksanakan.

Berdasarkan tujuan awal program pemberdayaan, maka dapat dikatakan telah efektif dikarenakan telah mencapai salah satu tujuannya yakni keterlibatan masyarakat bawah dimulai dari keluarga, kekerabatan dan persaudaraan sehingga keefektifan pemberdayaan dapat dilaksanakan. Pemberdayaan masyarakat melalui Program yang melibatkan keterlibatan dan partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga sudah melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

#### **Demokrasi dan penerapan ilmu**

Kegiatan pendidikan orang dewasa merupakan proses penyadaran menuju kepada pembebasan oleh sebab itu proses pemberdayaan harus dibebaskan dari upaya-upaya menciptakan ketergantungan atau bentuk-bentuk penindasan baru artinya melalui pemberdayaan penerima manfaat harus diberi kesempatan seluas-luasnya

untuk Menyampaikan pengalaman dan mengembangkan daya nalarnya sehingga dalam proses pemberdayaan tersebut kedudukan fasilitator (sebagai pendidik) dan penerima manfaat (yang dididik) berada dalam situasi yang setara.<sup>13</sup>

Proses demokrasi (metode pemberdayaan) dan pengambilan keputusan dalam kegiatan musyawarah desa masyarakat cenderung bersikap pasif dan menerima saja hasil keputusan. Proses penyadaran ini perlu pula mengkaji problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat miskin, sehingga solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada pada diri mereka. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Wilayah Perbatasan oleh Pos Lintas Batas Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perbatasan RI-RDTL belum melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis demokrasi dan penerapan ilmu.

#### **Belajar sambil bekerja**

Inti dari kegiatan pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan adalah terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk terus-menerus melakukan perubahan. Dengan perkataan lain, pemberdayaan harus didesain sebagai proses belajar atau dalam setiap upaya pemberdayaan harus

---

<sup>13</sup> Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Surakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 210

terkandung upaya-upaya pembelajaran dan penyelenggaraan pelatihan.<sup>14</sup>

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui belajar sambil bekerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, masyarakat terlibat dan diberikan kesempatan untuk belajar dan dapat merasakan pengalaman nyata dan tidak hanya sekedar menerima informasi atau konsep-konsep teoritis tentang program, dengan demikian dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Wilayah Perbatasan oleh Pos Lintas Batas Negara sudah melaksanakan prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis belajar sambil bekerja.

#### **Penggunaan metode yang sesuai**

Pemberdayaan masyarakat dengan prinsip penggunaan metode yang sesuai sudah dilaksanakan dengan baik, dengan demikian peneliti memberikan kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Wilayah Perbatasan oleh Pos Lintas Batas Negara di Perbatasan RI-RDTL sudah melaksanakan prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan penggunaan metode pemberdayaan masyarakat yang sesuai.

#### **Kepemimpinan.**

Kualifikasi fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam aspek kepemimpinan adalah Kemauan dan kemampuan untuk menjalin hubungan secara langsung dan

tidak langsung dengan masyarakat penerima manfaatnya; Kemauan dan kemampuan untuk menjadi perantara antara sumber-sumber inovasi (lembaga penelitian, tokohmasyarakat) dengan pemerintah/ lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat sasaran; Kemauan dan kemampuan untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan-kebutuhan yang dapat dirasakan oleh pemerintah/lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat sasaran. Selanjutnya berdasarkan hasil data-data sekunder, peneliti kemukakan komponen program PPIP sebagai salah satu pengembangan masyarakat dalam aspek kepemimpinan yaitu program ini akan mendukung dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan, merencanakan, melaksanakan, mengelola dan memantau pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Wilayah Perbatasan oleh Pos Lintas Batas Negara di Perbatasan RI-RDTL sudah melaksanakan prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan kepemimpinan.

#### **Segenap keluarga,**

Kegiatan PPIP sebagai salah satu program pemerintah yang fokus kepada pembangunan infrastruktur mengutamakan keluarga sebagai organisasi masyarakat yang terkecil, dan berikut adalah data sekunder

---

<sup>14</sup> Ibid. hlm. 68

berdasarkan komponen program, konsep dan dampak manfaat analisis segenap keluarga.

Pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Wilayah Perbatasan oleh Pos Lintas Batas Negara di Perbatasan RI-RDTL sudah melaksanakan prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan segenap keluarga.

### **Kepuasan**

Salah satu tolok ukur dari keberhasilan sebuah proyek adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses dan hasil yang dapat dicapai selama program berlangsung.

Cara mengukur tingkat kepuasan masyarakat dilakukan melalui dua teknik yaitu wawancara terstruktur dan diskusi kelompok terarah (FGD). Aspek yang dilihat dari kepuasan masyarakat antara lain meliputi transparansi informasi program, pengetahuan masyarakat tentang program, ketersediaan informasi dan publikasi program, termasuk yang terkait dengan mekanisme penanganan keluhan masyarakat tentang program hingga kepada tingkat kepuasan masyarakat dan stakeholder/pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan dan hasil program.

Tingkat kepuasan, pemberdayaan masyarakat telah mendorong agar masyarakat luas dapat mengetahui tentang program. Pengetahuan masyarakat terhadap program kelak dapat membantu partisipasi

masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan program hingga pengawasan dan pelestarian infrastruktur yang telah dibangun. Hal ini dilakukan melalui 2 bentuk kegiatan yakni sosialisasi program melalui pertemuan, publikasi atas program.

Disamping itu pengaduan masyarakat berkenaan dengan penyimpangan atau dampak negatif dari pelaksanaan program. Kesemua ini menunjukkan bahwa program dirancang tidak semata mengukur kepuasan masyarakat dari sisi hasil fisik infrastruktur yang dibangun, melainkan juga dari aspek proses dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Wilayah Perbatasan di Perbatasan RI-RDTL sudah melaksanakan prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis kepuasan.

### **Kondisi Wilayah Perbatasan Republik Indonesia - Republik Demokratik Timor Leste**

Masyarakat di wilayah perbatasan merupakan masyarakat yang terbilang paling rawan terkena pengaruh oleh pihak lain, yang kemudian akan menyebabkan terbentuknya frontier, sehingga menjurus pada kecenderungan masyarakat di wilayah perbatasan bersifat ekstrim/ pembangkangan sehingga bermuara pada

timbulnya konflik baik konflik vertikal maupun konflik komunal.

Panjang garis batas RI-RDTL adalah 268,8 Km terdiri dari 907 titik koordinasi dan sampai saat ini telah ditanamkan patok pancangan perbatasan. Sarana dan prasarana seperti jaringan jalan darat, belum memberikan adanya kelancaran jalur transportasi darat dari ibu kota Propinsi ke daerah perbatasan, demikian pula jalan penghubung dari satu titik perbatasan ke titik perbatasan yang lain belum secara keseluruhan dapat ditempuh dengan kendaraan darat.

Sarana dan prasarana pos-pos pengamanan pada umumnya belum memadai seperti menara peninjau, Helypad dan akomodasi lain yang belum representatif dan masih terbatas, akibat dari kurangnya prasarana tersebut telah mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap garis perbatasan secara keseluruhan.

Disamping adanya kelemahan pada aspek pengawasan tentang keamanan masih belum adanya prasarana jaring jalan transportasi darat yang menghubungkan antar titik perbatasan menyebabkan terlambatnya arus transportasi barang yang berimplikasi pada lambatnya perkembangan ekonomi di daerah perbatasan.

#### **Sumber Daya Manusia.**

Sumber daya manusia potensi masyarakat NTT terutama yang berada di

wilayah perbatasan RI - RDTL dinilai masih cukup jauh dibandingkan dengan daerah lain. Asumsi ini berpijak pada kondisi obyektif yang ada, di mana mutu sumber daya manusia di NTT sangat rendah. Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi daya pikir, daya serap serta kreativitas masyarakat perbatasan, dengan kondisi tersebut produktivitas masyarakat sangat kurang dan menimbulkan angka pengangguran cukup tinggi sehingga sering menimbulkan permasalahan kriminalitas di wilayah. Walaupun kondisi perekonomian masyarakat di perbatasan sangat rendah tetapi keadaan ini lebih baik dibandingkan di wilayah RDTL.

Karakteristik lain dari masyarakat di perbatasan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan serta tingginya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan belum disentuhnya pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pada skala prioritas di daerah perbatasan selama ini merupakan faktor yang semakin melumpuhkan sendi-sendi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat, tingginya jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya jumlah anak-anak putus sekolah.

### **Ideologi dan politik.**

Masyarakat Indonesia yang bermukim di perbatasan RI RDTL memiliki kesetiaan terhadap ideologi negara yaitu Pancasila, demikian juga secara politik sampai saat ini mereka tetap eksis untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata dunia internasional. Potensi pengaruh politik dari seberang perbatasan (Negara RDTL) cenderung lebih besar dibanding dari wilayah negara RI, aspek politik yang ada di perbatasan sangat dipengaruhi oleh dimensi sosial dan budaya yaitu berkenaan dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di perbatasan dengan masyarakat RDTL. Keterlibatan PBB dalam penyelesaian konflik yang terjadi di RDTL. Secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap dinamika pertahanan di Indonesia terutama di wilayah perbatasan dengan adanya faktor kepentingan dari salah satu negara yang tergabung dalam satuan pengamanan perdamaian di RDTL.

Isu politik yang menonjol pada akhir-akhir ini adalah isu disintegrasi, dengan adanya provokasi dari sebagian besar masyarakat terkait dengan pembangunan wilayah dan pemberian bantuan dari pemerintah maupun LSM yang di nilai kurang adil, tidak tepat sasaran dan adanya keberpihakan sehingga menimbulkan

kecemburuan sosial dari sekelompok orang akan keberadaan warga eks Timor-Timur.

### **Perkembangan Ekonomi.**

Sebagian besar penduduk di perbatasan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian yang digarap secara tradisional. Tanaman pangan yang paling produktif sesuai dengan kondisi tanah yang tandus dan iklim yang kering adalah jagung, namun karena bukan bahan makanan pokok (beras), maka masyarakat perbatasan harus mendapatkan beras dari daerah lain.

Dengan sulitnya mendapatkan kebutuhan sehari-hari dihadapkan dengan terbatasnya sarana transportasi ke daerah tersebut menyebabkan sulit tumbuhnya lapangan pekerjaan baru. Implikasi dari kondisi tersebut adalah mahalnya harga-harga barang, baik bahan pokok maupun bahan-bahan sekunder sehingga memberikan peluang kepada oknum masyarakat untuk memanfaatkan kondisi tersebut melakukan tindakan penyelundupan baik dari wilayah Indonesia maupun sebaliknya seperti penyelundupan BBM, Sembako dan barang-barang elektronik.

Kondisi saat ini yang dapat mendukung bidang perekonomian masyarakat saat ini di wilayah perbatasan adalah peternakan sapi/kerbau dengan memanfaatkan kondisi alam dengan banyaknya bentangan padang rumput di sekitar wilayah perbatasan.

### **Sosial Budaya.**

Beberapa persoalan sosial yang rawan yang terjadi saat ini adalah munculnya kecemburuan sosial antara penduduk asli dan penduduk eks pengungsi Propinsi Timor-Timur. Penduduk asli merasa mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah di mana bantuan/subsidi untuk kelangsungan hidup hanya diberikan kepada penduduk eks Timor-Timur, akibat yang ditimbulkan dari pemberian subsidi ini banyak penduduk eks Timor-Timur menjadi malas dan menganggur hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Permasalahan yang sering terjadi di perbatasan adalah kasus pelintas batas illegal yang terjadi di wilayah perbatasan, hal ini disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan garis keturunan bagi penduduk di wilayah perbatasan dan permasalahan ekonomi.

### **Bidang Pertahanan dan Keamanan.**

Batas wilayah perbatasan RI-RDTL mempunyai nilai yang sangat vital, apabila terjadi permasalahan di perbatasan yang ditimbulkan oleh rakyat di kedua negara, maka secara langsung akan berpengaruh pada situasi keamanan di kedua negara.

Dalam mengantisipasi konflik yang terjadi di perbatasan RI-RDTL telah tergelar satuan Pengamanan wilayah Barat, yaitu antara Kabupaten Belu (NKRI) dengan wilayah Tilos (RDTL).

Pada kasus pelintas batas illegal banyak disebabkan karena keinginan untuk

mengunjungi sanak keluarga, hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya jalan yang menghubungkan kedua negara yang tidak dapat di awasi oleh petugas pengamanan dan terbatasnya pos imigrasi serta belum terselesaikannya sarana dan prasarana penunjang keimigrasian.

Dengan demikian masyarakat di wilayah perbatasan merupakan masyarakat yang terbilang paling rawan terkena pengaruh oleh pihak lain, yang kemudian akan menyebabkan terbentuknya frontier, sehingga menjurus pada kecenderungan masyarakat di wilayah perbatasan bersifat ekstrim/pembangkangan sehingga bermuara pada timbulnya konflik baik konflik vertikal maupun konflik komunal. Disamping adanya kelemahan pada aspek pengawasan tentang keamanan masih belum adanya prasarana jaring jalan transportasi darat yang menghubungkan antar titik perbatasan menyebabkan terlambatnya arus transportasi barang yang berimplikasi pada lambatnya perkembangan ekonomi di daerah perbatasan.

### **Peningkatan Stabilitas keamanan Wilayah Perbatasan Republik Indonesia - Republik Demokratik Timor Leste oleh Pos Lintas Batas Negara**

Kemampuan ketahanan wilayah di perbatasan. Dihadapkan dengan pendekatan aspek alamiah dan aspek kemasyarakatan dalam membentuk

Ketahanan Wilayah dapat dilihat dari kondisi potensi sumber daya alam dan regulasi perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, Aksesibilitas, Transportasi dan Komunikasi serta kondisi keamanan dan pertahanan.

1. Aspek ideologi. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dalam rangka mengeliminir masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham separatis, yang mengancam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah perbatasan RI-RDTL. Oleh karena itu perlu adanya suatu pembinaan ideologi Pancasila yang terus menerus, tetapi tidak bersifat indoktrinasi dan yang paling penting adanya keteladanan dari para pemimpin bangsa.
2. Aspek ekonomi. Wilayah perbatasan RI-RDTL sebagian besar terdiri dari pegunungan kapur dan dataran yang ditumbuhi rumput dengan Sumber Daya Manusia yang belum dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kondisi yang ada saat ini dapat menjadi potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengolah lahan yang ada menjadi lahan produktif dengan ditanami tanaman

industri. Untuk memiliki ketahanan wilayah pada aspek ekonomi ke depan perlu adanya perbaikan di sektor SDM dan penambahan modal/ anggaran. Pembangunan pada sektor ekonomi yang diharapkan adalah mengedepankan pembangunan ekonomi kerakyatan dan didukung oleh sarana dan prasarana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan RI-RDTL. Pembangunan pada sektor ekonomi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta dapat menekan harga kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan sehingga harga dapat bersaing dengan di wilayah RDTL.

3. Aspek sosial budaya. Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan memiliki adat istiadat yang kuat dan sikap primordialisme yang begitu kental, hal tersebut bila diarahkan dengan baik akan berpotensi menjadi kekuatan wilayah, dengan kuatnya pengaruh lembaga adat akan lebih mudah untuk memberdayakan potensi masyarakat di perbatasan. Disamping itu pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang dapat meningkatkan ketahanan di bidang sosial budaya melalui pembangunan

sektor pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta pemahaman hukum positif perlu di tingkatkan serta di pedomani oleh masyarakat dalam menyelesaikan setiap sengketa atau permasalahan di masyarakat, dalam hal ini hukum adat diposisikan selaras dengan hukum positif yang berlaku.

4. Aspek Pertahanan. Kondisi wilayah yang berkaitan dengan aspek pertahanan sangat berdimensi dengan kondisi ekonomi, sosial budaya dan keamanan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dengan akan di laksanakan prioritas pembangunan di wilayah perbatasan terutama pada sarana transportasi (jaring jalan), sarana listrik dan komunikasi serta sarana umum lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan, maka dengan kondisi tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh satgas pamtas dalam melaksanakan tugas.

Dengan demikian, kemampuan Pemerintah Daerah. Permasalahan yang terjadi di perbatasan akan menyangkut masalah bidang keamanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya sinkronisasi pembangunan dengan Pemerintah Daerah maka dalam merealisasikan program pembangunan

daerah dapat terencana , terpadu dan terarah pada sektor sektor yang menjadi skala prioritas, sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Pusat. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dalam rangka mengeleminir masuknya pemahaman idiologi lain seperti faham separatis, yang mengancam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah perbatasan RI-RDTL, dengan Aspek ekonomi.

#### **Kesimpulan.**

Pemberdayaan Wilayah Perbatasan RI - RDTL oleh Pos Lintas Batas Negara dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan wilayah sudah melaksanakan 10 (sepuluh) dari 12 (dua belas) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi analisis minat dan kebutuhan, analisis prinsip pengorganisasian masyarakat, analisis keragaman budaya lokal, analisis perubahan budaya, analisis belajar sambil bekerja, analisis penggunaan metode yang sesuai, analisis kepemimpinan, analisis spesialis yang terlatih, analisis segenap keluarga dan analisis kepuasan. Walaupun 2 (dua) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat belum optimalnya dilaksanakan yaitu prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis kerja sama partisipasi dan prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan

analisis demokrasi dalam penerapan ilmu, hal ini disebabkan karena

Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh fasilitator masyarakat dan perangkat kelembagaan desa dalam memberikan informasi terkait dengan program yang diberikan oleh Pos Lintas Batas Negara.

Kurangnya kesadaran masyarakat baik sebagai individu maupun anggota masyarakat menyangkut kondisi dan lingkungannya sehingga kecenderungannya peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar perbatasan berjalan lamban.

Sebagian besar masyarakat tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk terlibat secara produktif dalam pengambilan keputusan.

Adanya budaya kepatuhan warga masyarakat terhadap penguasa wilayah (tokoh formal maupun informal) yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam kebijakan pengambilan keputusan.

Masyarakat di wilayah perbatasan merupakan masyarakat yang terbilang paling rawan terkena pengaruh oleh pihak lain, yang kemudian akan menyebabkan terbentuknya frontier, sehingga menjurus pada kecenderungan masyarakat di wilayah perbatasan bersifat ekstrim/pembangkangan sehingga bermuara pada timbulnya konflik baik konflik vertikal maupun konflik komunal. Disamping adanya kelemahan pada aspek pengawasan tentang keamanan masih belum adanya prasarana

jaring jalan transportasi darat yang menghubungkan antar titik perbatasan menyebabkan terlambatnya arus transportasi barang yang berimplikasi pada lambatnya perkembangan ekonomi di daerah perbatasan.

Dihadapkan dengan pendekatan aspek alamiah dan aspek kemasyarakatan dalam menciptakan stabilitas keamanan Wilayah dapat dilihat dari kondisi potensi sumber daya alam dan regulasi perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, Aksesibilitas, Transportasi dan Komunikasi serta kondisi keamanan dan pertahanan. Dengan Aspek ideologi. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dalam rangka mengeliminir masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham separatis, yang mengancam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah perbatasan RI-RDTL, dengan Aspek ekonomi. Wilayah perbatasan RI-RDTL sebagian besar terdiri dari pegunungan kapur dan dataran yang ditumbuhi rumput dengan Sumber Daya Manusia yang belum dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Aspek sosial budaya. Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan memiliki adat istiadat yang kuat dan sikap primodialisme yang begitu kental, hal tersebut bila diarahkan dengan baik akan berpotensi menjadi kekuatan wilayah, dengan kuatnya pengaruh

lembaga adat akan lebih mudah untuk memberdayakan potensi masyarakat di perbatasan.

## Rekomendasi

Usulan penulis pada Pemberdayaan Wilayah Perbatasan Republik Indonesia - Republik Demokratik Timor Leste Oleh Pos Lintas Batas Negara Dalam Rangka Meningkatkan Stabilitas Keamanan Wilayah adalah :

1. Perlu membangun komunikasi dan pemahaman serta komitmen kepada seluruh masyarakat pentingnya dalam meningkatkan kerjasama dalam merealisasikan segala program pemberdayaan di wilayah perbatasan
2. Pos Lintas Batas Negara bersama Pemerintah Daerah setempat termasuk pemerintah desa perlu mengoptimalkan kegiatan sosialisasi ditingkat desa mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Melakukan proses penyadaran masyarakat baik sebagai individu maupun anggota masyarakat tentang kondisi lingkungannya baik yang menyangkut lingkungan fisik, sosial budaya dan ekonomi termasuk menunjukkan pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaannya.
4. Memberikan kesempatan pendidikan non formal masyarakat

sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami segala sesuatu hal yang berkaitan dengan norma dan etika yang ada.

5. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengemukakan ide, gagasan dan pendapatnya terutama dalam hal segala sesuatu upaya dalam hal pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan karakteristik budaya, nilai-nilai social dan peraturan dalam masyarakat

## Daftar Pustaka

### Buku

- Aprilia Theresia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto. 2013. *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Surakarta: Alfabeta.
- Mardikanto. 2013. *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. surakarta: Alfabeta.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Riyadi dan Deddy Supriyadi  
Bratakusumah. 2005. Perencanaan  
Pembangunan Daerah. Jakarta : PT  
Gramedia Pustaka Utama.

### **Perundang Undangan**

Undang-undang No. 26 Tahun 2007  
tentang Penataan Ruang.

UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah  
Negara RI, Peraturan Pemerintah  
No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana  
Tata Ruang Wilayah Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 43 Tahun 2008 tentang  
Wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007  
tentang Rencana Pembangunan  
Jangka Panjang Nasional (RPJP)  
Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-undang RI No. 43 tahun 2008  
tentang wilayah negara.

### **Internet**

HughWolverine, “Indonesia Sebagai  
Negara Kepulauan Terbesar Di  
Dunia #IniIndonesiaku”,  
<https://www.kaskus.co.id/thread/5b7c5a2496bde6102b8b4567/indonesia-sebagai-negara-kepulauan-terbesar-di-dunia-iniindonesiaku/>,  
diakses pada 10 Agustus 2019

Slamet, Sp., “PERBATASAN RI-RDTL Arti  
Penting dan Sumber Ancaman”,  
<http://linggaakmil98.blogspot.com/2011/03/v-behaviorurldefaultvml-o.html> , diakses pada 25 Juli 2019